

PENGARUH SERTIFIKASI ISPO DAN RSPO TERHADAP KEBERLANJUTAN USAHATANI KELAPA SAWIT RAKYAT: TINJAUAN LITERATUR

Guido Imanuel Pardede^{1)*}

¹⁾ *Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas HKBP Nommensen Medan,
email: pardedeimanuel54@gmail.com

*Penulis Korespondensi: e-mail: pardedeimanuel54@gmail.com

ABSTRAK

Usahatani kelapa sawit rakyat menghadapi tantangan serius dalam mencapai keberlanjutan, terutama di tengah tuntutan pasar global akan praktik pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) menjadi instrumen penting untuk meningkatkan tata kelola dan daya saing sektor sawit rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sertifikasi ISPO dan RSPO terhadap keberlanjutan usahatani kelapa sawit rakyat melalui kajian literatur terhadap 15 artikel ilmiah yang relevan dan terbit dalam kurun 10 tahun terakhir. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan analisis kualitatif terhadap dokumen terakreditasi. Hasil studi menunjukkan bahwa sertifikasi berkontribusi terhadap perbaikan praktik budidaya, akses pasar, dan kesejahteraan petani, namun pelaksanaannya masih terhambat oleh keterbatasan kapasitas, biaya sertifikasi, serta minimnya dukungan kelembagaan. Diperlukan strategi kemitraan multipihak dan penguatan sistem sertifikasi nasional untuk meningkatkan adopsi sertifikasi di kalangan petani swadaya, sekaligus menjawab tantangan globalisasi pasar minyak sawit. Kajian ini memberikan implikasi penting bagi perumusan kebijakan yang lebih responsif dan inklusif terhadap petani kecil dalam sistem sertifikasi keberlanjutan.

Kata kunci: *ISPO, Keberlanjutan, Kelapa Sawit Rakyat, RSPO, Sertifikasi*

PENDAHULUAN

Kelapa sawit merupakan komoditas strategis nasional yang telah berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, baik dari sisi pendapatan negara, penciptaan lapangan kerja, maupun peningkatan kesejahteraan petani. Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia, dengan luas areal sebesar 16,83 juta hektar dan produksi sebesar 46,82 juta ton pada tahun 2022 (Badan Pusat Statistik, 2024). Dengan kapasitas produksi yang cukup besar tersebut, menjadikan Indonesia juga eksportir CPO terbesar di dunia, yang

menguasai pangsa lebih dari 55% total minyak kelapa sawit yang diekspor di dunia (Badan Pusat Statistik, 2024). Sebagian besar produksi kelapa sawit Indonesia berasal dari perkebunan rakyat yang mengelola lahan secara swadaya (Fatima et al., 2024), dengan sentra produksi kelapa sawit di Indonesia terkonsentrasi di Provinsi Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi (Badan Pusat Statistik, 2024). Perkebunan rakyat ini berperan penting dalam menunjang ketahanan ekonomi wilayah pedesaan serta

turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pengelolaan usahatani kelapa sawit rakyat seharusnya menerapkan prinsip keberlanjutan, baik dari aspek lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Hal ini penting mengingat adanya tekanan global terhadap praktik pertanian yang tidak ramah lingkungan, termasuk isu deforestasi, degradasi lahan gambut, dan hilangnya keanekaragaman hayati yang dituding sebagai dampak negatif dari ekspansi kelapa sawit (Nainggolan et al., 2024). Oleh karena itu, berbagai inisiatif dan sistem sertifikasi keberlanjutan telah dikembangkan, seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang bersifat sukarela dan berskala internasional, serta Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang bersifat wajib di tingkat nasional (Rosyadi et al., 2020).

RSPO dan ISPO bertujuan untuk meningkatkan praktik budidaya yang berkelanjutan melalui prinsip-prinsip seperti pelestarian lingkungan, hak-hak masyarakat lokal, transparansi, dan kepatuhan hukum (Christiawan, 2020). Sertifikasi ini diharapkan dapat menjadi instrumen untuk memperbaiki tata kelola, memperluas akses pasar, dan meningkatkan nilai tambah produk sawit, khususnya bagi petani rakyat (Erina, 2024). Selain itu, keberadaan sertifikasi ini terbukti memberikan pengaruh positif terhadap volume ekspor minyak sawit mentah (CPO) Indonesia, terutama ke negara-negara tujuan utama seperti India dan Belanda (Rosyadi et al., 2020).

Namun demikian, kondisi nyata di lapangan menunjukkan bahwa adopsi sertifikasi ISPO dan RSPO di kalangan petani sawit rakyat masih tergolong rendah. Banyak petani yang belum memahami konsep dasar, manfaat, maupun proses sertifikasi tersebut (Nainggolan et al., 2024; Hadi et al., 2023). Keterbatasan akses

informasi, mahalnya biaya sertifikasi, serta belum adanya insentif harga menjadi hambatan utama (Oliphant & Simon, 2022; Rizky et al., 2024). Selain itu, kebijakan pemerintah terkait ISPO pun masih menghadapi tantangan dalam hal harmonisasi dengan regulasi lokal dan keterlibatan pemangku kepentingan di tingkat akar rumput (Aisyah et al., 2024).

Di sisi lain, beberapa studi menunjukkan bahwa petani yang telah mendapatkan pendampingan atau menjalin kemitraan dengan perusahaan atau lembaga keuangan lebih cenderung untuk melakukan sertifikasi, karena mereka memperoleh dukungan teknis dan finansial (de Vos et al., 2023; Nainggolan et al., 2025). Hal ini memperlihatkan pentingnya pendekatan berbasis kemitraan dan kearifan lokal dalam mendorong adopsi sertifikasi keberlanjutan (Ernah et al., 2021). Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kapasitas petani, tetapi juga meningkatkan kesadaran mereka terhadap pentingnya keberlanjutan dalam jangka panjang (Rahutomo et al., 2023).

Dalam konteks globalisasi dan perdagangan internasional, permintaan akan minyak sawit berkelanjutan terus meningkat, khususnya dari negara-negara Uni Eropa yang mensyaratkan produk bersertifikasi RSPO (Malau & Rambe, 2022). Hal ini menuntut Indonesia untuk memperkuat sistem sertifikasi domestik (ISPO) agar memiliki kredibilitas dan pengakuan internasional yang setara dengan RSPO (Brandi et al., 2015; Tey et al., 2020). Tanpa adanya penyesuaian dan perbaikan terhadap sistem tersebut, risiko kehilangan pasar ekspor semakin besar (Rosyadi et al., 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, maka kajian literatur ini disusun untuk meninjau secara sistematis pengaruh sertifikasi ISPO dan RSPO terhadap keberlanjutan usahatani

kelapa sawit rakyat. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran sertifikasi terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam usahatani kelapa sawit rakyat, serta menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Dengan memahami secara mendalam dinamika sertifikasi ini, diharapkan dapat ditemukan strategi yang tepat untuk mendorong keberlanjutan dalam sektor perkebunan rakyat di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun dengan menggunakan metode studi pustaka yang mengacu pada berbagai sumber literatur ilmiah yang relevan dengan topik pengaruh sertifikasi ISPO dan RSPO terhadap keberlanjutan usahatani kelapa sawit rakyat. Literatur yang dikaji berasal dari data primer sekunder berupa jurnal nasional dan internasional yang dipublikasikan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2015–2024).

Proses pencarian dan seleksi jurnal dilakukan secara sistematis melalui platform basis data ilmiah seperti Google Scholar, ResearchGate, dan repositori jurnal nasional yang terindeks dalam sistem SINTA (Science and Technology Index). Literatur yang dipilih harus memenuhi kriteria relevansi dengan fokus kajian, kredibilitas penerbit, dan keterbacaan penuh (full-text). Secara khusus, penulis menggunakan 15 artikel ilmiah sebagai sumber utama yang membahas dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dari sertifikasi ISPO dan RSPO pada sektor perkebunan kelapa sawit rakyat.

Seluruh literatur yang terpilih kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi temuan-temuan penting terkait dampak, tantangan, dan peluang implementasi sertifikasi dalam

mewujudkan praktik usahatani yang berkelanjutan. Analisis dilakukan dengan cara mengelompokkan isi artikel ke dalam tema-tema besar yang sesuai, mengevaluasi kesesuaian antar hasil penelitian, serta menyusun sintesis dari beragam perspektif keilmuan.

Hasil dari proses telaah ini digunakan sebagai dasar untuk merumuskan pembahasan dan kesimpulan dalam artikel ilmiah yang bersifat analitis dan reflektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Strategis Sertifikasi ISPO dan RSPO dalam Mewujudkan Usahatani Sawit Berkelanjutan

Sertifikasi keberlanjutan seperti ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dan RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) memiliki peran penting dalam mengarahkan pengelolaan usahatani kelapa sawit rakyat menuju praktik yang lebih bertanggung jawab secara lingkungan, sosial, dan ekonomi. ISPO merupakan skema nasional yang bersifat wajib, sedangkan RSPO adalah inisiatif global yang bersifat sukarela namun lebih diterima di pasar internasional (Christiawan, 2020). Kedua sistem ini dirancang untuk menanggapi tuntutan global terhadap produksi sawit yang ramah lingkungan dan menghormati hak-hak masyarakat lokal (Rosyadi et al., 2020; Erina, 2024).

Secara fungsional, ISPO dan RSPO tidak hanya memberikan standar teknis untuk praktik budidaya sawit, tetapi juga menjadi instrumen tata kelola yang mampu memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan legalitas dalam sektor perkebunan (Nainggolan et al., 2025). Penerapan prinsip-prinsip sertifikasi tersebut mencakup perlindungan terhadap hutan, konservasi keanekaragaman hayati, pelibatan masyarakat lokal, dan kepatuhan terhadap peraturan

hukum (Aisyah et al., 2024). Oleh karena itu, sertifikasi ini berkontribusi dalam menciptakan sistem usahatani yang tidak hanya produktif tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang (Ernah et al., 2021).

Dari perspektif ekonomi, keikutsertaan petani dalam skema sertifikasi dapat memberikan akses yang lebih luas ke pasar internasional serta meningkatkan daya tawar produk sawit rakyat. Hal ini tercermin dalam peningkatan volume ekspor minyak sawit bersertifikasi ke negara-negara tujuan utama seperti India dan Belanda (Rosyadi et al., 2020). Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa perusahaan sawit yang bersertifikat RSPO mengalami peningkatan dalam kinerja finansial karena adanya preferensi pasar terhadap produk yang berkelanjutan (Malau & Rambe, 2022). Meski demikian, dampak ekonomi terhadap petani swadaya masih sangat bergantung pada keterlibatan mereka dalam rantai pasok yang terhubung dengan pasar premium (Oliphant & Simon, 2022).

Dari sisi sosial, penerapan sertifikasi dapat mendorong penguatan kapasitas kelembagaan petani dan meningkatkan kesadaran mereka terhadap hak-hak sosial serta kondisi kerja yang layak. Dalam studi oleh Nainggolan et al. (2024), dijelaskan bahwa salah satu strategi penting untuk mendukung keberlanjutan usahatani sawit rakyat adalah peningkatan pemahaman terhadap prinsip-prinsip sertifikasi melalui pelatihan dan pendampingan. Di sisi lain, sertifikasi juga mendorong pengakuan atas hak atas tanah dan memperkuat posisi tawar petani dalam hubungan kemitraan dengan perusahaan atau koperasi (de Vos et al., 2023).

Aspek lingkungan juga menjadi perhatian utama dalam skema ISPO dan RSPO. Dalam beberapa studi, disebutkan bahwa penerapan praktik pertanian berkelanjutan seperti pelarangan pembukaan

lahan dengan cara membakar, konservasi lahan gambut, serta rehabilitasi areal kritis telah menjadi bagian dari standar sertifikasi (Fatima et al., 2024; Rahutomo et al., 2023). Penerapan standar ini tidak hanya bermanfaat bagi kelestarian lingkungan, tetapi juga meminimalkan risiko konflik sosial dan kerusakan ekosistem jangka panjang (Erina, 2024).

Secara umum, sertifikasi ISPO dan RSPO memberikan arah strategis bagi transformasi sektor perkebunan kelapa sawit rakyat dari praktik tradisional menuju sistem usaha yang lebih modern, tertib, dan berkelanjutan. Namun demikian, keberhasilan implementasi sertifikasi sangat ditentukan oleh kapasitas petani untuk memenuhi standar yang ditetapkan serta dukungan kelembagaan yang memadai (Nainggolan et al., 2025; Hadi et al., 2023). Tanpa adanya dukungan dalam bentuk pelatihan teknis, fasilitasi biaya sertifikasi, serta integrasi ke dalam rantai pasok yang berkelanjutan, tujuan dari sertifikasi tersebut sulit tercapai secara optimal (Rizky et al., 2024; Oliphant & Simon, 2022).

Dengan demikian, sertifikasi ISPO dan RSPO bukan hanya sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan perangkat strategis yang dapat membentuk fondasi keberlanjutan dalam usahatani kelapa sawit rakyat. Untuk memastikan dampak positif dari sertifikasi ini, perlu ada sinergi antara pemerintah, pelaku industri, lembaga pendamping, dan petani sebagai subjek utama dalam pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan (Nainggolan et al., 2025; Ernah et al., 2021).

Dampak Sertifikasi terhadap Keberlanjutan Usahatani: Dimensi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan

Sertifikasi ISPO dan RSPO memberikan pengaruh yang signifikan

terhadap keberlanjutan usahatani kelapa sawit rakyat di Indonesia, mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara integral. Dari sisi ekonomi, berbagai studi menunjukkan bahwa sertifikasi mampu membuka akses pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing produk sawit rakyat. Rosyadi et al. (2020) menemukan bahwa penerapan sertifikasi RSPO berkontribusi langsung pada peningkatan ekspor CPO Indonesia ke negara-negara yang mensyaratkan keberlanjutan dalam rantai pasoknya, seperti India dan Belanda. Selain itu, Malau dan Rambe (2022) membuktikan bahwa perusahaan kelapa sawit yang telah tersertifikasi RSPO mengalami peningkatan performa keuangan, yang menjadi bukti bahwa keberlanjutan tidak selalu identik dengan biaya tambahan, melainkan dapat menjadi investasi jangka panjang. Namun demikian, pada level petani swadaya, hasil literatur menunjukkan bahwa dampak ekonomi dari sertifikasi belum sepenuhnya merata. Beberapa petani yang telah mendapatkan pendampingan mencatat peningkatan efisiensi dan produktivitas lahan setelah mengikuti proses sertifikasi (Rahutomo et al., 2023), sementara sebagian besar lainnya masih menghadapi kendala finansial dan administrasi. Tingginya biaya sertifikasi serta tidak adanya jaminan premium price membuat sebagian petani enggan mengikuti skema ini (Oliphant & Simon, 2022). Hal ini mengindikasikan perlunya mekanisme dukungan insentif ekonomi bagi petani rakyat, terutama dalam bentuk subsidi biaya sertifikasi, pembiayaan lunak, dan akses terhadap pasar berkelanjutan.

Dari aspek sosial, keberadaan sertifikasi telah mendorong terjadinya transformasi dalam kesadaran petani terhadap prinsip-prinsip keadilan sosial, perlindungan tenaga kerja, dan kepatuhan terhadap hukum. Penelitian oleh Erina (2024) menunjukkan

bahwa penerapan prinsip sertifikasi membawa perubahan pada tata kelola sosial dalam usahatani sawit, di antaranya melalui peningkatan kesadaran terhadap perlindungan hak pekerja dan pentingnya transparansi administrasi. Rizky et al. (2024) juga menggarisbawahi bahwa sebagian besar petani mulai memahami dan menghargai prinsip-prinsip dasar ISPO, meskipun masih memerlukan proses sosialisasi dan pendampingan lebih lanjut.

Studi oleh Nainggolan et al. (2024) menekankan bahwa program pendampingan, pelatihan, dan kemitraan menjadi faktor krusial dalam membentuk perilaku sosial petani terhadap sertifikasi. Pendekatan berbasis kemitraan ini tidak hanya meningkatkan literasi keberlanjutan, tetapi juga memperkuat kelembagaan petani dalam menghadapi tantangan sertifikasi. Demikian pula, de Vos et al. (2023) menggarisbawahi pentingnya peran lembaga pendukung dalam menjembatani kebutuhan teknis dan administratif petani menuju proses sertifikasi.

Dari sisi lingkungan, sertifikasi ISPO dan RSPO menetapkan standar teknis yang bertujuan mengurangi dampak negatif kegiatan perkebunan terhadap ekosistem. Aisyah et al. (2024) menjelaskan bahwa standar tersebut mencakup pelarangan pembukaan lahan dengan pembakaran, pelestarian kawasan lindung, dan pengelolaan limbah secara terukur. Fatima et al. (2024) juga menambahkan bahwa sistem sertifikasi telah mendorong petani untuk menerapkan praktik budidaya yang lebih ramah lingkungan, meskipun penerapan teknis di lapangan masih menghadapi sejumlah hambatan struktural. Hal ini selaras dengan temuan Christiawan (2020) yang menilai bahwa ISPO merupakan instrumen penting dalam mendukung transisi menuju ekonomi hijau, selama didukung oleh penegakan regulasi dan verifikasi yang konsisten.

Meski demikian, tantangan teknis dan finansial dalam implementasi praktik ramah lingkungan masih menjadi kendala utama di tingkat petani kecil. Nainggolan et al. (2025) mencatat bahwa minimnya akses terhadap informasi dan teknologi ramah lingkungan mengakibatkan ketimpangan dalam penerapan standar keberlanjutan di kalangan petani swadaya. Oleh karena itu, selain memperkuat sistem sertifikasi, diperlukan juga dukungan konkret dalam bentuk penyuluhan, teknologi terjangkau, dan kemitraan berbasis lokal untuk memastikan sertifikasi tidak hanya menjadi simbol kepatuhan, melainkan juga menjadi alat transformasi menuju praktik usahatani yang benar-benar berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sertifikasi ISPO dan RSPO secara umum berkontribusi positif terhadap keberlanjutan usahatani sawit rakyat, namun dampaknya sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung seperti pendampingan, pembiayaan, kapasitas kelembagaan, dan dukungan regulatif yang kuat. Kajian literatur ini menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif dan adaptif menjadi kunci dalam mewujudkan keberlanjutan perkebunan rakyat di tengah kompleksitas tantangan yang ada.

Kendala Implementasi Sertifikasi ISPO dan RSPO di Kalangan Petani Rakyat

Implementasi sertifikasi ISPO dan RSPO di kalangan petani kelapa sawit rakyat menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis yang kompleks. Salah satu tantangan utama yang sering dihadapi adalah rendahnya pemahaman petani terhadap konsep, manfaat, dan proses sertifikasi itu sendiri. Banyak petani masih belum sepenuhnya mengerti prinsip keberlanjutan dan dokumen yang dibutuhkan untuk mengikuti skema sertifikasi, sehingga menyebabkan

ketidaksiapan dalam memenuhi persyaratan administratif dan teknis (Nainggolan et al., 2024). Hal ini diperburuk dengan rendahnya tingkat literasi formal dan akses informasi di wilayah pedesaan yang menjadi basis utama usahatani rakyat.

Selain masalah pemahaman, faktor biaya juga menjadi penghalang signifikan dalam proses sertifikasi. Petani swadaya umumnya tidak memiliki kapasitas finansial untuk menanggung beban biaya audit, pelatihan, maupun perbaikan teknis yang dibutuhkan sebelum mengikuti sertifikasi. Studi oleh Oliphant dan Simon (2022) menegaskan bahwa biaya sertifikasi RSPO bagi petani kecil di Indonesia dinilai terlalu tinggi jika dibandingkan dengan manfaat ekonomi langsung yang mereka peroleh. Bahkan dalam banyak kasus, tidak ada jaminan harga premium yang diberikan kepada petani setelah bersertifikasi, yang membuat mereka semakin enggan untuk berpartisipasi dalam program tersebut (Hadi et al., 2023).

Tantangan lainnya muncul dari sisi regulasi dan kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada petani kecil. Harmonisasi antara regulasi nasional, lokal, dan standar sertifikasi internasional masih belum optimal, menyebabkan kebingungan dan beban ganda dalam implementasinya (Aisyah et al., 2024). Dalam konteks ISPO, misalnya, ketidaksinkronan antara kewajiban formal dan kesiapan infrastruktur pendukung di daerah menjadi kendala yang cukup signifikan (Erina, 2024). Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya koordinasi lintas sektor dalam memberikan pendampingan dan fasilitasi kepada petani sawit rakyat.

Aspek sosial dan kelembagaan juga menjadi penghambat utama keberhasilan sertifikasi. Banyak petani bekerja secara individual dan belum tergabung dalam kelembagaan koperasi atau kelompok tani

yang kuat, padahal proses sertifikasi cenderung lebih efisien dan terjangkau apabila dilakukan secara kolektif (de Vos et al., 2023). Selain itu, minimnya pelibatan petani dalam pengambilan keputusan serta kurangnya dialog antara pemangku kepentingan seringkali menimbulkan resistensi dan kecurigaan terhadap skema sertifikasi (Fatima et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan top-down tidak cukup efektif, dan perlu adanya integrasi pendekatan partisipatif berbasis kearifan lokal (Nainggolan, Ginting, & Mulyo, 2025).

Dari sisi teknis, keterbatasan akses terhadap sarana produksi berkelanjutan juga menjadi kendala. Banyak petani masih menggunakan metode budidaya tradisional yang belum memenuhi standar teknis keberlanjutan, seperti pengelolaan limbah, pemupukan organik, dan konservasi lahan (Rahutomo et al., 2023). Kurangnya pelatihan dan fasilitas teknis dari pemerintah maupun sektor swasta memperburuk kesenjangan ini. Bahkan ketika petani sudah memahami prinsip sertifikasi, mereka sering kali kesulitan menerapkannya secara teknis karena keterbatasan alat dan tenaga pendukung (Ernah et al., 2021).

Di sisi lain, terdapat juga tantangan dalam hal pengawasan dan monitoring terhadap kepatuhan petani terhadap standar ISPO dan RSPO. Kurangnya tenaga auditor serta lemahnya sistem pelaporan dan evaluasi menyebabkan proses sertifikasi tidak berjalan konsisten di seluruh wilayah (Christiawan, 2020). Akibatnya, standar keberlanjutan yang seharusnya menjadi acuan utama justru menjadi formalitas administratif tanpa dampak signifikan terhadap perbaikan praktik budidaya di lapangan.

Persepsi petani terhadap manfaat sertifikasi pun menjadi persoalan tersendiri. Sebagian besar petani beranggapan bahwa sertifikasi lebih menguntungkan perusahaan

besar karena mereka memiliki sumber daya dan jaringan pasar yang kuat, sementara petani kecil hanya menjadi pelengkap dalam rantai pasok global (Rizky et al., 2024). Ketimpangan ini menimbulkan kesan bahwa sistem sertifikasi belum inklusif dan berpihak pada petani kecil. Oleh karena itu, perlu adanya reformulasi kebijakan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan petani rakyat.

Secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sertifikasi ISPO dan RSPO sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, lembaga pendamping, koperasi petani, dan pelaku industri. Strategi akselerasi perlu difokuskan pada penyederhanaan proses sertifikasi, pemberian insentif finansial, peningkatan kapasitas kelembagaan petani, dan penguatan regulasi yang berpihak kepada sektor swadaya (Rosyadi et al., 2020; Malau & Rambe, 2022). Tanpa upaya sistemik tersebut, sertifikasi keberlanjutan hanya akan menjadi dokumen administratif yang jauh dari realitas kebutuhan petani kelapa sawit rakyat di lapangan.

Strategi Dukungan dan Kemitraan dalam Mendorong Adopsi Sertifikasi oleh Petani Swadaya

Peningkatan adopsi sertifikasi ISPO dan RSPO di kalangan petani swadaya membutuhkan strategi dukungan yang terstruktur dan kemitraan multipihak yang berkelanjutan. Pendekatan yang terbukti efektif adalah melalui peningkatan kapasitas pengetahuan petani terhadap standar dan prinsip sertifikasi. Dalam hal ini, pelatihan dan pendampingan teknis menjadi komponen penting. Nainggolan et al. (2024) menyatakan bahwa program edukasi berbasis lokal terbukti mampu meningkatkan kesadaran petani tentang pentingnya keberlanjutan dan mempercepat kesiapan mereka mengikuti

skema sertifikasi. Edukasi ini lebih berhasil ketika disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya setempat.

Kemitraan antara petani dan perusahaan besar juga memainkan peran sentral dalam mendorong sertifikasi. Melalui skema kemitraan, perusahaan dapat memberikan bantuan teknis, akses pasar, serta memfasilitasi proses administrasi sertifikasi. de Vos et al. (2023) menekankan bahwa keberadaan perusahaan mitra mempermudah petani dalam memenuhi prasyarat RSPO, terutama dalam aspek manajemen kelembagaan dan legalitas lahan. Dukungan tersebut mampu mengatasi keterbatasan internal petani dalam menghadapi tuntutan teknis dan dokumentatif dari skema sertifikasi.

Selain perusahaan, peran pemerintah daerah dan lembaga pendamping menjadi sangat strategis. Pemerintah dapat menginisiasi skema insentif, subsidi sertifikasi, hingga program konsolidasi lahan petani swadaya agar proses sertifikasi lebih efisien. Hadi et al. (2023) menunjukkan bahwa intervensi pemerintah dalam bentuk regulasi afirmatif dan fasilitasi kelompok tani bersertifikasi dapat mempercepat sertifikasi ISPO, terutama di perkebunan swadaya yang sebelumnya tidak terorganisir. Hal ini juga diamini oleh Aisyah et al. (2024), yang menyebutkan bahwa kolaborasi lintas aktor harus dibarengi dengan pelibatan aktif petani sejak tahap perencanaan program.

Kemitraan yang ideal juga melibatkan LSM atau organisasi non-pemerintah, yang sering berperan sebagai fasilitator independen antara petani dan pasar. Peran mereka penting dalam menjaga prinsip keberlanjutan dan keadilan dalam rantai pasok minyak sawit. Oliphant dan Simon (2022) mengungkapkan bahwa keberadaan lembaga pendamping mampu mengurangi risiko beban finansial petani melalui pendekatan pembiayaan

kolektif atau skema bantuan teknis gratis. Hal ini turut memperkuat kepercayaan petani terhadap sistem sertifikasi.

Strategi berbasis komunitas juga patut diperhatikan. Kelembagaan lokal seperti koperasi atau kelompok tani dapat dijadikan sarana kolektif untuk proses sertifikasi bersama, sehingga menekan biaya dan memperkuat solidaritas antarpetani. Ernah et al. (2021) menekankan bahwa penguatan kelompok tani dan pelatihan manajemen organisasi merupakan langkah awal penting dalam menciptakan fondasi keberlanjutan berbasis masyarakat. Pendekatan kolektif ini juga didukung oleh Rahutomo et al. (2023), yang menekankan bahwa konsolidasi petani menjadi satu entitas kelembagaan memungkinkan pencapaian skala ekonomi dalam produksi dan pemasaran.

Kombinasi antara dukungan struktural, edukasi berkelanjutan, dan kemitraan inklusif terbukti memberikan hasil positif terhadap adopsi sertifikasi. Nainggolan, Ginting, dan Mulyo (2025) menyimpulkan bahwa wilayah dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan perusahaan cenderung memiliki tingkat sertifikasi petani yang lebih tinggi. Mereka juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis kearifan lokal dalam merancang strategi intervensi agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan tradisi masyarakat setempat.

Penting pula untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam mendukung adopsi sertifikasi. Fatima et al. (2024) menyarankan penggunaan sistem informasi berbasis aplikasi yang dapat membantu petani memantau kepatuhan terhadap standar sertifikasi dan menyimpan data produksi secara digital. Hal ini relevan dengan perkembangan industri 4.0 dan kebutuhan transparansi dalam rantai pasok global.

Secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa strategi yang bersifat kolaboratif, partisipatif, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam mendorong keberhasilan sertifikasi ISPO dan RSPO di kalangan petani swadaya. Dengan membangun ekosistem dukungan yang kuat antara petani, perusahaan, pemerintah, dan lembaga pendamping, maka tujuan keberlanjutan dapat tercapai secara lebih inklusif dan merata (Rosyadi et al., 2020; Erina, 2024; Christiawan, 2020).

Urgensi Penguatan Sistem Sertifikasi Nasional dalam Konteks Globalisasi Pasar Sawit

Dalam menghadapi dinamika globalisasi pasar minyak sawit, penguatan sistem sertifikasi nasional seperti ISPO menjadi semakin penting sebagai instrumen legitimasi dan daya saing produk sawit Indonesia. Sertifikasi nasional bukan hanya berfungsi sebagai alat kontrol keberlanjutan, tetapi juga sebagai respons terhadap meningkatnya tuntutan pasar internasional terhadap aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi yang berkelanjutan (Christiawan, 2020). Dalam konteks ini, ISPO perlu direformasi menjadi lebih adaptif dan selaras dengan standar internasional seperti RSPO agar mampu bersaing di pasar global yang semakin kompetitif.

Sejumlah studi menekankan bahwa lemahnya posisi tawar ISPO dalam perdagangan internasional disebabkan oleh kurangnya pengakuan global serta belum optimalnya tata kelola pelaksanaan sertifikasi di tingkat lapangan (Erina, 2024). Hal ini diperkuat oleh temuan Rosyadi et al. (2020), yang menyatakan bahwa RSPO memiliki pengaruh lebih besar dalam meningkatkan ekspor minyak sawit ke negara-negara tujuan dibandingkan ISPO. Perbedaan ini menuntut pemerintah Indonesia untuk mengakselerasi

harmonisasi standar ISPO dengan prinsip-prinsip RSPO atau standar global lainnya agar lebih diterima oleh pasar dunia.

Dalam praktiknya, ISPO juga masih menghadapi tantangan pada aspek implementasi kelembagaan dan pengawasan, khususnya di level petani swadaya. Penelitian oleh Nainggolan et al. (2024) menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara peraturan sertifikasi dengan kapasitas pelaksanaannya di tingkat petani, sehingga proses sertifikasi seringkali tidak efisien dan kurang berdampak nyata. Hal ini menunjukkan perlunya integrasi sistem informasi, simplifikasi prosedur, serta peningkatan kapasitas teknis bagi lembaga verifikasi dan petani penerima manfaat.

Di sisi lain, globalisasi juga menuntut agar sertifikasi nasional memiliki nilai tambah dalam meningkatkan posisi kompetitif minyak sawit Indonesia di pasar internasional. Menurut Aisyah et al. (2024), ISPO yang diperkuat dapat menjadi alat diplomasi dagang yang strategis apabila dilengkapi dengan transparansi data, sistem akuntabilitas yang kuat, dan dukungan teknologi. Hal senada dikemukakan oleh Hadi et al. (2023), yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif aktor negara dan non-negara dalam memperkuat tata kelola sertifikasi, sehingga tidak hanya sebagai kewajiban administratif, melainkan juga sebagai jaminan mutu produk sawit berkelanjutan.

Penguatan ISPO juga harus mempertimbangkan dimensi keadilan akses bagi petani swadaya. Saat ini, sertifikasi lebih banyak didominasi oleh perusahaan besar karena mereka memiliki kapasitas administratif dan sumber daya yang memadai. Oleh karena itu, Nainggolan, Ginting, dan Mulyo (2025) menggarisbawahi pentingnya diferensiasi pendekatan antara perusahaan dan petani kecil, di mana sistem sertifikasi nasional perlu memberikan skema insentif atau afirmasi khusus kepada petani rakyat

sebagai bagian dari strategi keberlanjutan inklusif.

Konteks globalisasi juga mendorong urgensi penguatan ISPO sebagai bentuk kedaulatan nasional dalam menghadapi tekanan politik dagang dari negara-negara maju. de Vos et al. (2023) menyatakan bahwa dominasi RSPO yang berbasis pada lembaga asing berpotensi menimbulkan ketimpangan pengaruh dalam menentukan standar keberlanjutan global. Oleh karena itu, Indonesia harus mengokohkan ISPO sebagai sertifikasi resmi negara yang kredibel dan sejajar di panggung internasional melalui penguatan kerangka hukum, sumber daya manusia, dan jejaring diplomasi dagang.

Lebih lanjut, penguatan ISPO bukan hanya soal teknis, tetapi juga perlu memperkuat narasi bahwa produk sawit Indonesia berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Menurut Fatima et al. (2024), sertifikasi ISPO dapat menjadi instrumen pembangunan hijau apabila pelaksanaannya didorong oleh prinsip inklusivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, ISPO tidak hanya menjadi alat legitimasi ekspor, tetapi juga mekanisme transformasi struktural dalam industri sawit nasional.

Secara keseluruhan, literatur menegaskan bahwa dalam era globalisasi pasar sawit, penguatan ISPO menjadi keniscayaan strategis. Indonesia membutuhkan sistem sertifikasi nasional yang tidak hanya kuat secara regulatif, tetapi juga responsif terhadap dinamika pasar global, adil terhadap pelaku lokal, dan sinergis dengan inisiatif keberlanjutan internasional (Oliphant & Simon, 2022; Rahutomo et al., 2023; Rizky et al., 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil tinjauan literatur, dapat disimpulkan bahwa sertifikasi ISPO dan

RSPO memiliki peran strategis dalam mendorong keberlanjutan usahatani kelapa sawit rakyat melalui peningkatan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sertifikasi memberikan insentif terhadap praktik pertanian yang ramah lingkungan, meningkatkan akses pasar, serta memperkuat posisi tawar petani di tengah dinamika global. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, khususnya di kalangan petani swadaya yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi, pembiayaan, dan kapasitas teknis. Untuk itu, strategi dukungan dan kemitraan yang inklusif sangat diperlukan, termasuk peran aktif pemerintah, lembaga swadaya, dan perusahaan inti dalam mendorong adopsi sertifikasi. Di tengah arus globalisasi, penguatan sistem sertifikasi nasional seperti ISPO menjadi sangat penting untuk mempertahankan daya saing produk sawit Indonesia, sekaligus menegaskan kedaulatan standar keberlanjutan domestik. Reformasi kelembagaan, harmonisasi dengan standar global, serta keberpihakan terhadap petani kecil perlu menjadi prioritas dalam memperkuat legitimasi dan efektivitas sistem sertifikasi nasional secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S., Frinaldi, A., Rembrandt., & Lanin, D. (2024). Kajian penerapan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) pada industri sawit berkelanjutan terhadap kondisi di masyarakat. *Agro Estate*, 8(2).
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Outlook Komoditas Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2024*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

- <https://satudata.pertanian.go.id/details/publikasi/696>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2023*. Jakarta: BPS-Statistics Indonesia. <https://www.bps.go.id/en/publication/2024/11/29/d5dcb42ab730df1be4339c34/statistik-kelapa-sawit-indonesia-2023.html>
- Christiawan, R. (2020). Implementasi Green Growth Economic pada industri kelapa sawit melalui sertifikasi ISPO. *Mulawarman Law Review*, 5(1), 47–60.
- de Vos, R. E., Suwarno, A., Slingerland, M., van der Meer, P. J., & Lucey, J. M. (2023). Pre-certification conditions of independent oil palm smallholders in Indonesia: Assessing prospects for RSPO certification. *Land Use Policy*, 130, 106660.
- Erina, N. G. F. (2024). Peran RSPO dan ISPO pada keberlanjutan industri minyak kelapa sawit di Indonesia: Studi kasus Indofood. *Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual*, 9(2), 290–298.
- Ernah, Wulandari, E., & Sudarjat. (2021). Pengenalan standar perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. *Jurnal Abdidas*, 2(1), 92–97.
- Fatima, Setiawan, E., Renata., & Ramadhani, A. (2024). Strategi pengelolaan berkelanjutan kelapa sawit di Indonesia. *Forum Ekonomi*, 26(4), 803–807.
- Hadi, S., Bakce, D., Muwardi, D., Yusri, J., & Septya, F. (2023). Strategi percepatan sertifikasi ISPO di perkebunan kelapa sawit swadaya. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 21(1), 21–42.
- Malau, L. R. E., & Rambe, K. R. (2022). Efek sertifikasi RSPO dan determinan lainnya terhadap kinerja keuangan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 18(2), 184–198.
- Nainggolan, H. L., Butar-Butar, K. M., Lawolo, O., Sitompul, J. B. M., & Nainggolan, L. H. (2024). Strategi peningkatan pemahaman petani terhadap sertifikasi ISPO-RSPO untuk mendukung sawit rakyat berkelanjutan. *Jurnal Agrikultura*, 35(3), 517–528.
- Nainggolan, H. L., Ginting, A., & Mulyo, J. H. (2025). Analisis eksisting, peran kearifan lokal dan implementasi ISPO-RSPO terhadap usahatani kelapa sawit rakyat berkelanjutan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. *Jurnal Agrikultura*, 36(1), 89–104.
- Oliphant, E., & Simon, A. C. (2022). The cost of sustainable palm oil: Should an Indonesian smallholder pursue RSPO-certification? *World Development Perspectives*, 26, 100432.
- Rahutomo, A. B., Karuniasa, M., & Frimawaty, E. (2023). Peningkatan produktivitas lahan pekebun melalui sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 21(1), 43–55.
- Rizky, T. M. H., Juliaviani, N., & Romano. (2024). Persepsi petani kelapa sawit

rakyat terhadap prinsip sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) di Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 9(3), 124–130.

Rosyadi, F. H., Darwanto, D. H., & Mulyo, J. H. (2020). Impact of Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) certification on the Indonesian CPO exports to the destination countries. *Agro Ekonomi*, 31(1), 184–198.